



Proses Penerbitan IMB Hotel Harus Dievaluasi

YOGYAKARTA – Komisi B DPRD Kota Yogyakarta minta Pemkot Yogyakarta mengevaluasi proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel baru. Terutama untuk 17 permohonan IMB yang masih diproses sejak pemberlakuan moratorium hotel tahun 2013.

"Kajian lalu lintas, dampak lingkungan, dan kajian budaya jika berada di jalur sumbu filosofis, sebagai syarat pendukung IMB harus benar-benar diperhatikan," kata Anggota Komisi B Supriyanto Untung, sesuai rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, kemarin.

Politikus PPP itu mengaku mendapat keluhan dari masyarakat seperti keberadaan hotel yang berdiri di sekitar persimpangan jalan kerap memicu kemacetan akibat lalu lintas kendaraan tamu hotel. Selain itu juga ada keluhan debit air sumur warga berkurang karena adanya hotel di tengah permukiman yang diindikasikan memanfaatkan

air tanah dangkal.

Menurutnya, meski kajian-kajian tersebut adalah kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, namun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan selaku pihak yang berwenang menerbitkan IMB tetap harus mencermatinya.

"Mereka kan juga punya petugas pemantau dan pengawas, bisa melihat langsung di lapangan apakah lokasi pembangunan sesuai dengan aturan, apakah telah memenuhi syarat," tandasnya.

Pria yang akrab disapa Lilik itu memberi contoh kondisi di simpang empat Balai Kota. Di sekitar lokasi tersebut berdiri dua hotel yang belum lama beroperasi dan dampaknya langsung dirasakan oleh pengguna jalan.

"Biasanya setelah lampu hijau, kendaraan bisa langsung jalan. Lha sekarang, meski lampu hijau tapi harus berhenti dulu karena ada kendaraan tamu hotel yang keluar masuk," imbuhnya.

Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan mengatakan, dari total 104 pendaftar yang mengajukan IMB sebelum moratorium 2013 wajib memenuhi seluruh persyaratan. "Dokumen kajian lalu lintas dan lingkungan (yang diserahkan pendaftar), kami tak meragukan karena diproses oleh instansi berwenang terkait," tandasnya. Heri pun menegaskan seluruh anak buahnya bekerja profesional dalam memproses segala bentuk perizinan.

Sementara itu Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Setiyono menambahkan, sebelum menerbitkan IMB, pihaknya terlebih dulu melakukan klarifikasi ke pihak terkait. "Jika sudah benar dan lengkap, baru kami keluarkan IMBnya," sebutnya.

Dia mengakui 17 berkas yang masih diproses itu karena persyaratan kurang lengkap sehingga pihaknya belum bisa menerbitkan IMB.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005